



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - BAB V Penutup

- (3) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 41 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA BAPPEDA) Kabupaten Malang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan RENJA BAPPEDA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan RENJA BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENJA BAPPEDA. Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang mulai dilaksanakan setelah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahannya kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang terkait mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah mendapat arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Setelah disusun, kemudian dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja

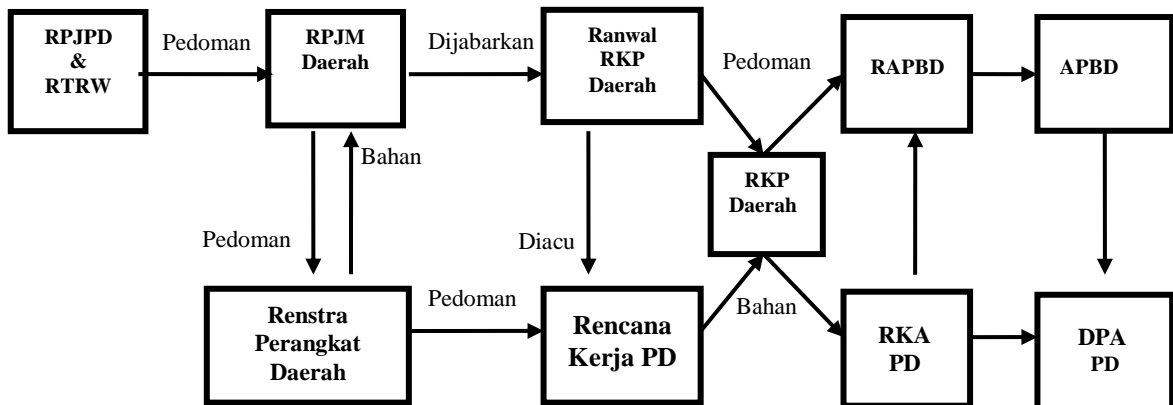
Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050.13/1371/35.07.202/2019 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musrenbang yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis sesuai hasil verifikasi. Rancangan Rencana Kerja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, sedangkan pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sesuai surat undangan Kepala Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 005/3437/35.07.202/2019 perihal Persiapan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan surat undangan Kepala Daerah melalui Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 005/3435/35.07.202/2019 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020, dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Malang selama tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
2. memperlancar tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
3. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) maupun Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2017 melakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang pada tahun berikutnya tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Adapun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 diantaranya mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan teknis sebanyak 10 (sepuluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dari program/kegiatan tahun 2017, yang mana pada tahun 2017 melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan teknis sebanyak 16 (enam belas) program dan 42 (empat puluh dua), hal tersebut sebagai implikasi adanya reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, dan

pada tahun berikutnya tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sehingga pada Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan baik nomenklatur program dan kegiatan maupun indikator kinerja yang disesuaikan kembali.

Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 10 program dan 42 kegiatan. Rata-rata tingkat capaian kinerja program kegiatan tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi 100%. Rata-rata tingkat capaian kinerja *program Total* Rencana Strategis sampai dengan tribulan II tahun 2019 rata-rata sebesar 82,35%, sedangkan Capaian kinerja *kegiatan Total* Rencana Strategis sampai dengan tribulan II tahun 2019 rata-rata sebesar 33,19% (sumber data dari e-Monev BAPPEDA Kabupaten Malang).

Adapun pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2019 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di bawah ini, diketahui bahwa pada perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019, pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali dilakukan revidi/perubahan terakhir dengan mengacu pada penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga harus melakukan kembali penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 tersebut. Implikasi dari adanya beberapa kali penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 tersebut, menjadikan perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019 dapat terukur maksimal karena adanya beberapa penyesuaian baik

nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, ada beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus).

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan baru tahun 2018 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan kegiatan-kegiatannya merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan kegiatan-kegiatannya merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - c. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan-kegiatannya merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena kegiatan telah dipersiapkan secara matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai. Adapun Program/kegiatan tersebut diantaranya adalah:
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, diantaranya:
 - 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019;
 - 2) Penyusunan RKPD 2019;
 - 3) Penyusunan PERDA Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 - 4) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2016-2021.

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, terkait dengan fungsi perencanaan

pembangunan infrastruktur yang melekat pada Bappeda, melakukan analisis dampak Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang dan studi rencana pengembangan *Smart Region*. Keduanya dalam tahap penyusunan oleh lembaga penelitian swasta.

- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diantaranya:
 - 1) Penyusunan LKPJ Tahun 2018;
 - 2) Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana pelayanan surat menyurat telah mencapai lebih dari 5.000 surat.
4. Adapun ada beberapa program/kegiatan dipandang kurang relevan untuk dilaksanakan BAPPEDA, sehingga yang harus dilimpahkan kewenangannya dan dialihkan ke kegiatan lain yang sesuai dengan fungsi Bappeda di bidang perencanaan diantaranya:
 - a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi yang merupakan kegiatan teknis pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar di bidang kesehatan, oleh sebab itu dipandang kurang relevan untuk dilaksanakan BAPPEDA, maka harus dialihkan ke kegiatan lain yang sesuai dengan fungsi Bappeda di bidang perencanaan;
 - b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang pada pertengahan Tahun 2018 telah dialihkan kewenangannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sesuai Disposisi Bupati Malang dalam Telaah Staf kepada Bupati Malang Tanggal 31 Mei 2018 Nomor: 050.13/3740/35.07.202/2018;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030 dalam Program Perencanaan Tata Ruang telah dialihkan/dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai Disposisi Bupati Malang dalam Telaah Staf kepada Bupati Malang tentang Rencana pelimpahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada

Tahun 2018. Penyusunan RTRW merupakan perencanaan tata ruang yang komprehensif sehingga dalam penyusunannya tidak lepas dari hal-hal teknis, sedangkan BAPPEDA Kabupaten/Kota adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dari pengertian tersebut bahwa BAPPEDA bukan sebagai instansi teknis yang menyusun peraturan terkait penataan ruang.

5. Adapun beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam pencapaian kinerja Program/kegiatan diantaranya:

a. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD. Kesesuaian antara RKPD dan RPJMD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyusunan RKPD berdasarkan pada aplikasi perencanaan yakni *e-Planning*, sehingga antara RKPD dan RPJMD berjalan selaras;
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan arahan kepada Perangkat Daerah akan pentingnya konsistensi perencanaan;
- Melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (*e-Planning*) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel;
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah.

b. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Kesesuaian antara RENJA PD dan RKPD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) telah memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan;

- Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memaksimalkan dalam hal pendokumentasian;
 - Melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (*e-Planning*) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel;
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah.
- c. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) telah disusun sesuai dengan aturan dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:
- Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah;
 - Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - Mengoptimalkan Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah terkait RENSTRA PD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Koordinasi dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- Proses verifikasi oleh Tim menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani

rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD /Perubahan RPJMD Kabupaten Malang;

- Hasil verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - Memberikan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin konsistensi antara Renstra/Perubahan Renstra dengan RPJMD/Perubahan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Aspirasi Masyarakat yang masuk telah diakomodir secara optimal dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten berjalan dengan lancar dan tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Malang No. 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.
 - Penerapan aplikasi *e-Musrenbang* membuat proses *entry* dan verifikasi usulan kegiatan yang masuk menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah dan kecamatan tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan terkait adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi usulan kegiatan yang masuk sesuai dengan kewenangan daerah;
- Mengembangkan aplikasi *e-Musrenbang* agar lebih lengkap dan lebih sederhana proses *entry*-nya.

e. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Hasil kinerja dapat dirangkum pada poin-poin berikut:

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai;
- Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait.

f. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan PD dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai;
- Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait.

g. Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman Penerapan anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan Perangkat Daerah dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai;
- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

h. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hasil Program Prioritas telah tercapai sesuai dengan nilai minimal yang ditetapkan dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disamping melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mempunyai tugas dan fungsi;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencanaan dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah terkait RENJA PD;

- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi e monev terkait dengan penyusunan evaluasi pelaksanaan RENJA PD dan RKPD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan lebih optimal;
- Penguatan peran verifikator Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA PD;
- Mengoptimalkan Pengendalian pelaksanaan RENJA PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja melalui supervisi penyusunan RKA-PD;
- Mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan RENJA PD;
- Surat edaran kepada Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA PD dengan menyampaikan laporan triwulan melalui sistem aplikasi e-monev.

6. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan diantaranya:
 - a. Kesalahan pemilihan kegiatan yang kurang menunjang fungsi;
 - b. Kesalahan penempatan rekening belanja;
 - c. Adanya perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
7. Beberapa Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah diantaranya:
 - a. Pengalihan kegiatan yang sesuai fungsi, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;
 - b. Penyesuaian rekening belanja, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;
 - c. Beberapa kegiatan terlambat dari jadwal yang telah diagendakan.
8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kurang optimalnya realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

adalah dengan melakukan pengkajian rencana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi hasil pemetaan, serta penyesuaian rekening belanjanya sehingga sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya (Tahun 2017) dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2019
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
1	Urusan: Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang: Perencanaan									
	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	25000 buah	5000 buah	5000 buah	7934 buah	158.68	5000 buah	17934 buah	71.73
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	3 rekening	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	60
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	840 OB	168 OB	168 OB	168 OB	100	168 OB	504 OB	60
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	24 OB	24 OB	24 OB	100	24 OB	72 OB	60
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis	-	32 jenis	32 jenis	100	32 jenis	32 jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	285 stel	-	70 stel	71 stel	101.4	57 stel	128 stel	44.91
	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	20. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	3 orang	9 orang	60
	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 buku	12 buku	1 buku	1 buku	100	5 buku	18 buku	105.8
	22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	8 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100	2 buku	5 buku	62.5
	23. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	8 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	2 buku	5 buku	62.5
	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	1 buku	3 buku	60

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	VI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur perencana	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
	25. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah peralatan dan pelatihan aplikasi e-Planning	1 paket	1 paket	-		-	-	1 paket	100
	VII. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
	26. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	8 dokumen	-	2 dokumen	3 dokumen	150	2 dokumen	5 dokumen	62.5
	27. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	8 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	50
	28. Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan	8 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	Permukiman	permukiman								
	VIII. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	100%	-	90%	90%	100	95%	95%	100
	29. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
	30. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
	31. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
	32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	8 dokumen	-	2 dokumen	1 dokumen	50	2 dokumen	3 dokumen	37.5
		Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	2 aplikasi	-	1 aplikasi	1 aplikasi	100	-	1 aplikasi	50
	33. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	(SIPD)									
	IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	95%	80%	92%	92%	100	93%	93%	100
	34. Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	5 dokumen	62.5
	35. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	410 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	100	82 dokumen	246 dokumen	60
	36. Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RPJMD yang disusun sesuai aturan dan	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
		tepat waktu								
		Jumlah dokumen Perubahan RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100
	37. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	100*
	38. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	66.67	3 kegiatan	8 kegiatan	53.33
	39. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
	40. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
	X. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase keterpaduan koordinasi spasial dan non spasial pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	100%	-	-	-	-	100%	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	41. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100
	XI. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase keterpaduan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
		Persentase keterpaduan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	-	-	-	-	100%	100
	42. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen studi kelayakan pengembangan wilayah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
	43. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen pengembangan wilayah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
	44. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen studi kelayakan pengembangan wilayah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	XII. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
	45. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	33.33
	46. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	5 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	20
	47. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	8 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25
	48. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	2 laporan	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	49. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	-	2 dokumen	100
	50. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100	-	3 laporan	100
	51. Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah aplikasi pengembangan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	-	1 laporan	100
	XIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	52. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	9 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	3 dokumen	33.33
	53. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	7 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	3 dokumen	42.85
	54. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	7 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	3 dokumen	42.85
	55. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen Disparitas Wilayah Kabupaten Malang yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100
	56. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	2 laporan	100
	57. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan hasil sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100
	58. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang Perencanaan Ekonomi	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/4)
	59. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100
	60. Verifikasi Data dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil Verifikasi Data, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100
	61. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100

*) Capaian Realisasi target Renstra s/d Tahun 2019 kurang terukur maksimal disebabkan ada beberapa capaian kerjanya tidak dapat diakumulasi/dihitung keseluruhan dalam periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dikarenakan terdapat beberapa perubahan baik nomenklatur program/kegiatan, target kinerja maupun volume/besaran kerjanya tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, terdapat beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten;
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha;
6. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi dokumen perencanaan daerah (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis).

Adapun kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang diantaranya adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, juga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Dalam hal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah.

Selain penyusunan dokumen perencanaan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (lima tahunan) dan Rencana Kerja (tahunan).

Dalam kinerja pelayanan sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi lintas Pemerintah Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta Program Pengentasan Kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Malang.

Dalam kinerja pelayanan sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Tahun 2017 BAPPEDA sudah tidak lagi menghasilkan produk berupa Buku (Buku Hasil-Hasil Pembangunan, Buku Kabupaten Malang Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan secara berseri setiap tahun), karena sudah dialihkan

kewenangannya ke Dinas KOMINFO, BAPPEDA hanya membantu dalam memfasilitasi penyediaan data/informasi perencanaan pembangunan salah satunya melalui Sistem Aplikasi Manajemen Informasi Data Kemiskinan (DAMIS) yang kemudian dibukukan dalam Buku Pemutakiran Baru Data Terpada (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di 390 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Malang, yang akan dilakukan reviu setiap 2 (dua) tahun sekali.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Bappeda												
1.	Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	95%	-	-	-	99%	-	-	-	
2.	Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	-	-	95%	-	-	-	95.39%	-	-	-	
3.	Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	-	-	96%	-	-	-	100%	-	-	-	
4.	Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	-	-	96%	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	-	-	92%	-	-	-	86.21%	-	-	-	
6.	Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	95%	-	-	-	100%	-	-	-	
7.	Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	95%	-	-	-	100%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	
8.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
9.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
10.	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	2996 HOK	
11.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	141 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	
12.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	-	-	372 HOK	372 HOK	372 HOK	372 HOK	372 HOK	372 HOK	372 HOK	372 HOK	
II.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
13.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	
14.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
15.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
16.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	-	-	1 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	
17.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
18.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	
19.	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	
20.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	0 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	0 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
VIII.	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	-	-	90%	95%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
30.	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
31.	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
32.	Jumlah dokumen LKPJ Bupati yang tersusun tepat waktu	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	
33.	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
34.	Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	-	-	1 aplikasi	0 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	
35.	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
IX.	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
X.	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	-	-	92%	93%	94%	95%	92%	93%	94%	95%	
36.	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
37.	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	0 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	0 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	82 dokumen	
38.	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	Jumlah Dokumen RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	0 dokumen	0 dokumen	0dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	
40.	Jumlah dokumen Perubahan RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	-	-	1dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	
41.	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	-	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	
42.	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
XI.	Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
XII.	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
43.	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	-	-	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
44.	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
45.	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
46.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
47.	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
48.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Bappeda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII.	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	0 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
XIV.	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	0 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
49.	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
50.	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
51.	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
52.	Jumlah dokumen informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke-2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi”, Sasaran ke-4 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan

akuntabel, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta Forum Perangkat Daerah untuk penyalarsan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada isu strategis yaitu *“Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah”*.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7.254.524.500,00					7.329.524.500,00	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.254.524.500,00					7.329.524.500,00	
	PERENCANAAN				7.254.524.500,00					7.329.524.500,00	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.254.524.500,00					7.329.524.500,00	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.014.625.500,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.014.625.500,00	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Bappeda Kabupaten Malang	5000 buah	14.640.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Bappeda Kabupaten Malang	5000 buah	14.640.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Bappeda Kabupaten Malang	12 bulan	8.920.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Bappeda Kabupaten Malang	12 bulan	8.920.000,00	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	168 OB	277.180.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	168 OB	277.180.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	42.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	42.000.000,00	
1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	13 jenis	35.974.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	13 jenis	35.974.900,00	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	2.530.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	2.530.000,00	
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	2 jenis	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	2 jenis	5.000.000,00	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	2996 HOK	20.680.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	2996 HOK	20.680.000,00	
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas	Bappeda Kabupaten Malang	150 HOK	352.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas	Bappeda Kabupaten Malang	150 HOK	352.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah	ke luar daerah (HOK)				Daerah	ke luar daerah (HOK)				
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	372 HOK	202.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	372 HOK	202.000.000,00	
1.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	50.200.600,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	50.200.600,00	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	24 OB	3.500.000,00		Jumlah petugas kebersihan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	24 OB	3.500.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	305.880.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	350.880.000,00	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	223.500.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	268.500.000,00	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	1 jenis	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	1 jenis	10.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Bappeda Kabupaten Malang	23 unit	57.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Bappeda Kabupaten Malang	23 unit	57.500.000,00	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	19 jenis	11.880.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	19 jenis	11.880.000,00	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	10 unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	10 unit	3.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	15.500.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	15.500.000,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Bappeda Kabupaten Malang	57 stel	15.500.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Bappeda Kabupaten Malang	57 stel	15.500.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	47.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	47.000.000,00	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Bappeda Kabupaten Malang	3 orang	47.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Bappeda Kabupaten Malang	3 orang	47.000.000,00	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	24.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	24.000.000,00	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	5 buku	7.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	5 buku	7.000.000,00	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	Bappeda Kabupaten	2 buku	6.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	Bappeda Kabupaten	2 buku	6.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Semesteran	laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Malang			Semesteran	laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Malang			
5.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	3.000.000,00	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	3.000.000,00	
5.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	1 buku	8.000.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	1 buku	8.000.000,00	
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	1.396.375.000,00	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	1.970.000.000,00	
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		94%			Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		95%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang diakomodir pada dokumen perencanaan					yang diakomodir pada dokumen perencanaan				
6.1	Penyusunan Rancangan RKP	Jumlah dokumen RKP disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	484.500.000,00	Penyusunan Rancangan RKP	Jumlah dokumen RKP disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	575.000.000,00	-
6.2	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	82 dokumen Renja / P-Renja	196.875.000,00	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	82 / 82 dokumen Renja / P-Renja	290.000.000,00	
		Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan e-Renja		0 Aplikasi	0,00		Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan e-Renja	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	
6.3	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah kegiatan Musrenbang RKP	Bappeda Kabupaten Malang	3 kegiatan	340.000.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah kegiatan Musrenbang RKP	Bappeda Kabupaten Malang	3 kegiatan	350.000.000,00	
6.4	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang	1 Dokumen	375.000.000,00	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang	1 Dokumen	585.000.000,00	
		Jumlah Dokumen	Kab. Malang	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen	Kab. Malang	0 Dokumen	0,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu					RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu				
		Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD		0 Aplikasi	0,00		Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKP terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	1.140.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKP terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	1.170.000.000,00	
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKP Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKP Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%		
7.1	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	380.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Sumber Daya Air	Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air				dan Sumber Daya Air	Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air				
7.2	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	380.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	
7.3	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	380.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%	940.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%	990.000.000,00	
		Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan		100%			Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan		100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya					Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya				
8.1	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	370.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	
8.2	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Bappeda Kabupaten Malang	3 dokumen	290.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Bappeda Kabupaten Malang	3 dokumen	310.000.000,00	
8.3	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	280.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	290.000.000,00	
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKP terhadap RPJMD Bidang		100%	890.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKP terhadap RPJMD Bidang		100%	940.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi					Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKP Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKP Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%		
9.1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	170.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	210.000.000,00	
9.2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	310.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	320.000.000,00	
9.3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	410.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	410.000.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ekonomi primer					ekonomi primer				
10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKP		100%	1.481.144.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKP		100%	807.519.000,00	
10.1	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	160.000.000,00	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	
10.2	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	200.000.000,00	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	
10.3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	400.000.000,00	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	Bappeda Kabupaten Malang	0 dokumen	0,00	
10.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	371.144.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	482.519.000,00	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah	PD dan RKPD				Pembangunan Daerah	PD dan RKPD				
		Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	Bappeda Kabupaten Malang	1 aplikasi	150.000.000,00		Jumlah aplikasi pengembangan e-Monev	Bappeda Kabupaten Malang	0 aplikasi	0,00	
10.5	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	200.000.000,00	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	125.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; serta
5. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

manusia;

17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sehingga strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Malang harus diarahkan pada upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Kabupten Malang untuk kurun waktu 2016-2021 akan mendukung dalam mewujudkan Visi

Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Bupati Malang untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang. BAPPEDA selaku penunjang fungsi pemerintahan di bidang perencanaan mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut:

Misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dengan Tujuan “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat”, melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada Sasaran ke-4 “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”, melalui Strategi “Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah” dan Arah Kebijakan “Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan penguatan kapasitas SDM Perencana”.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan perencanaan yang berkualitas. Bappeda sebagai perangkat daerah penunjang pemerintahan yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan bertugas menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Disamping itu Bappeda juga mengkoordinir seluruh PD dalam menyusun Renstra dan Renja PD.

Dalam mewujudkan Misi Bupati Malang, ditetapkan 3 Strategi umum yaitu menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dan memperkuat daya saing daerah. Bappeda berperan mengintegrasikan strategi umum tersebut dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja PD serta memastikan program dan kegiatan PD dalam Renstra dan Renja PD mendukung pencapaian Visi Bupati.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2020 sebagai penjabaran Renstra BAPPEDA kabupaten Malang 2016-2021 disesuaikan dengan tupoksi BAPPEDA serta menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terbagi menjadi:

Sasaran Strategis (menaungi Program Teknis) yaitu Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah

(RENSTRA PD).

2. Persentase kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sasaran Penunjang (menaungi Program Rutin) yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase administrasi umum yang dikelola.
2. Persentase kinerja aparatur yang dikelola.

3.2.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Malang, yaitu dengan upaya:

- a. Membangun koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan kerjasama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintahan dan lintas *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi pembangunan sesuai mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
- c. Mengembangkan karier aparatur perencana ;
- d. Melaksanakan kegiatan administratif dan sarana-prsarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Malang, yang ditempuh dengan upaya:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan sesuai mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;

- c. Melaksanakan dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis, serta peningkatan kualifikasi, integritas dan moralitas pegawai;
- d. Menyediakan layanan administrasi dan sarana-prasarana perkantoran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan ke dalam Urusan baru yaitu urusan Penunjang Pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 10 program dan 39 kegiatan dengan total anggaran Rp. 7.254.524.500,00 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Malang, termasuk kegiatan teknis dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
9. Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

3.3.2 Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
9. Penyediaan Makanan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
18. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
23. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman;
24. Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air;
25. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
26. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN;
28. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
29. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

30. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
31. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
32. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
33. Penyusunan Rancangan RKPD;
34. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
35. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD;
36. Penyusunan Rancangan RPJMD
37. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer;
38. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder;
39. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier.

Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendukung program responsif gender sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan Musrenbang merupakan forum koordinasi perencanaan antar pelaku pembangunan baik unsur pemerintah, swasta, organisasi wanita, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah untuk merumuskan program/kegiatan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan Musrenbang, komposisi peserta laki-laki dan perempuan yaitu 70% dan 30%, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 delegasi terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan.

- b. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman pada Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Kegiatan perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman diantaranya menangani perencanaan sanitasi dan permukiman warga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik laki-laki-perempuan, tua-muda, anak-anak maupun balita.

- c. Kegiatan Pembangunan Ekonomi Primer pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
Kegiatan ini menangani pemberdayaan produk unggulan daerah, diantaranya upaya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah dimana pelaku usahanya banyak terdiri dari unsur perempuan.
- d. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan pendataan *by name by address* penduduk miskin Kabupaten Malang. Hal ini untuk memudahkan mengarahkan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Kegiatan ini merupakan upaya mengawasi pelaksanaan pembangunan agar lebih terpantau dan terukur pencapaiannya, serta pada saat terdapat kendala dalam pelaksanaannya dapat cepat ditemukan solusi agar tidak mempengaruhi capaian kinerja pembangunan. Dalam hal para Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sangat berperan penting dalam penyediaan data evaluasi dan pelaporan yang diperlukan akurasi data dan ketepatan waktu penyampaian laporannya.

Dari uraian diatas, berikut ini penjelasan ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan RKPD sebagai berikut:

- a. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan rutin yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Ekonomi, Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, dan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan kegiatan-kegiatannya.

- b. Beberapa tambahan nomenklatur program/kegiatan baru dan perubahan indikator kinerjanya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 diantaranya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; Perencanaan Pembangunan Pemerintahan; Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer; Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder; Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier. Oleh sebab itu program dan kegiatan dimaksud dialokasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 sesuai analisis kebutuhan sekaligus menyesuaikan indikator kinerjanya.
- c. Beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang tidak dialokasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 s.d Tahun 2021 karena di pandang kurang relevan untuk dilaksanakan BAPPEDA yaitu Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang pada pertengahan Tahun 2018 telah dialihkan kewenangannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sesuai Disposisi Bupati Malang dalam Telaah Staf kepada Bupati Malang Tanggal 31 Mei 2018 Nomor: 050.13/3740/35.07.202/2018

Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengkoordinir kegiatan Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7.329.524.500,00				6.207.328.500,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.329.524.500,00				6.207.328.500,00
4.401	PERENCANAAN				7.329.524.500,00				6.207.328.500,00
4.401.27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.329.524.500,00				6.207.328.500,00
4.401.27.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.014.625.500,00			100%	1.019.925.500,00
4.401.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Bappeda Kabupaten Malang	5000 buah	14.640.000,00	APBD Kabupaten		5000 buah	15.640.000,00
4.401.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Bappeda Kabupaten Malang	12 bulan	8.920.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	8.970.000,00
4.401.27.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	168 OB	277.180.000,00	APBD Kabupaten		168 OB	277.180.000,00
4.401.27.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	42.000.000,00	APBD Kabupaten		32 jenis	43.000.000,00
4.401.27.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	13 jenis	35.974.900,00	APBD Kabupaten		13 jenis	36.024.900,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	2.530.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	2.630.000,00
4.401.27.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	5.000.000,00
4.401.27.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	2996 HOK	20.680.000,00	APBD Kabupaten		2996 HOK	20.780.000,00
4.401.27.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	150 HOK	352.000.000,00	APBD Kabupaten		150 HOK	353.000.000,00
4.401.27.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	372 HOK	202.000.000,00	APBD Kabupaten		372 HOK	203.000.000,00
4.401.27.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	50.200.600,00	APBD Kabupaten		32 jenis	51.200.600,00
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	24 OB	3.500.000,00	APBD Kabupaten		24 OB	3.500.000,00
4.401.27.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	350.880.000,00			100%	308.880.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	268.500.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	224.500.000,00
4.401.27.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	1 jenis	10.000.000,00	APBD Kabupaten		1 jenis	10.000.000,00
4.401.27.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Bappeda Kabupaten Malang	23 unit	57.500.000,00	APBD Kabupaten		23 unit	58.500.000,00
4.401.27.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	19 jenis	11.880.000,00	APBD Kabupaten		19 jenis	12.880.000,00
4.401.27.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	10 unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten		10 unit	3.000.000,00
4.401.27.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	15.500.000,00			100%	15.600.000,00
4.401.27.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Bappeda Kabupaten Malang	57 stel	15.500.000,00	APBD Kabupaten		57 stel	15.600.000,00
4.401.27.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	47.000.000,00			100%	47.000.000,00
4.401.27.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Bappeda Kabupaten Malang	3 orang	47.000.000,00	APBD Kabupaten		3 orang	47.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	24.000.000,00			100%	25.000.000,00
4.401.27.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	5 buku	7.000.000,00	APBD Kabupaten		5 buku	8.000.000,00
4.401.27.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	6.000.000,00	APBD Kabupaten		2 buku	6.000.000,00
4.401.27.05.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	3.000.000,00	APBD Kabupaten		2 buku	3.000.000,00
4.401.27.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	1 buku	8.000.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	8.000.000,00
4.401.27.06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	1.970.000.000,00			100%	820.923.000,00
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan		94%				95%	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.06.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	575.000.000,00	APBD Kabupaten	-	2 dokumen	310.500.000,00
4.401.27.06.02	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	82 / 82 dokumen Renja / P-Renja	290.000.000,00	APBD Kabupaten		82 dokumen Renja / P-Renja	160.423.000,00
		Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan e-Renja	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	APBD Kabupaten		0 Aplikasi	0,00
4.401.27.06.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	Bappeda Kabupaten Malang	3 kegiatan	350.000.000,00	APBD Kabupaten		3 kegiatan	350.000.000,00
4.401.27.06.04	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang	1 Dokumen	585.000.000,00	APBD Kabupaten		0 Dokumen	0,00
		Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	APBD Kabupaten		0 Aplikasi	0,00
4.401.27.07	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	1.170.000.000,00			100%	1.170.000.000,00
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%				100%	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.07.01	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	390.000.000,00
4.401.27.07.02	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	390.000.000,00
4.401.27.07.03	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	390.000.000,00
4.401.27.08	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%	990.000.000,00			100%	970.000.000,00
		Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%				100%	
4.401.27.08.01	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	380.000.000,00
4.401.27.08.02	Perencanaan Pembangunan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan	Bappeda Kabupaten Malang	3 dokumen	310.000.000,00	APBD Kabupaten		3 dokumen	300.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budaya	Pembangunan Sosial Budaya							
4.401.27.08.03	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	290.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	290.000.000,00
4.401.27.09	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%	940.000.000,00			100%	920.000.000,00
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%				100%	
4.401.27.09.01	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	210.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	180.000.000,00
4.401.27.09.02	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	320.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	320.000.000,00
4.401.27.09.03	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	410.000.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	420.000.000,00
4.401.27.10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD		100%	807.519.000,00			100%	910.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.10.01	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	160.000.000,00
4.401.27.10.02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	200.000.000,00
4.401.27.10.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	482.519.000,00	APBD Kabupaten		2 dokumen	350.000.000,00
4.401.27.10.05	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	125.000.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	200.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan sebuah dokumen perencanaan, diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran serta pendanaannya sehingga mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 10 Program dengan 39 kegiatan, adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan tersebut dirumuskan dalam Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					7.329.524.500,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.329.524.500,00		
4.401	PERENCANAAN				7.329.524.500,00		
4.401.27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.329.524.500,00		
4.401.27.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.014.625.500,00		
4.401.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Bappeda Kabupaten Malang	5000 buah	14.640.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Bappeda Kabupaten Malang	12 bulan	8.920.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	168 OB	277.180.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	42.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	13 jenis	35.974.900,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	2.530.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	2 jenis	5.000.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.27.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	2996 HOK	20.680.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	150 HOK	352.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Bappeda Kabupaten Malang	372 HOK	202.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	32 jenis	50.200.600,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	Bappeda Kabupaten Malang	24 OB	3.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	350.880.000,00		
4.401.27.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	3 jenis	268.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	1 jenis	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Bappeda Kabupaten Malang	23 unit	57.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	19 jenis	11.880.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Bappeda Kabupaten Malang	10 unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.27.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	15.500.000,00		
4.401.27.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Bappeda Kabupaten Malang	57 stel	15.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	47.000.000,00		
4.401.27.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Bappeda Kabupaten Malang	3 orang	47.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	24.000.000,00		
4.401.27.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	5 buku	7.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.05.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	2 buku	3.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Bappeda Kabupaten Malang	1 buku	8.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		100%	1.970.000.000,00		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan		94%			
4.401.27.06.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	575.000.000,00	APBD Kabupaten	-
4.401.27.06.02	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Bappeda Kabupaten Malang	82 / 82 dokumen Renja / P-Renja	290.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan e-Renja	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.06.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	Bappeda Kabupaten Malang	3 kegiatan	350.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.06.04	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kab. Malang	1 Dokumen	585.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD	Bappeda Kabupaten Malang	1 Aplikasi	85.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.07	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	1.170.000.000,00		
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.27.07.01	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.07.02	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.07.03	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.08	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%	990.000.000,00		
		Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya		100%			
4.401.27.08.01	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	390.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.08.02	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Bappeda Kabupaten Malang	3 dokumen	310.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.08.03	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	290.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.09	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%	940.000.000,00		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100%			
4.401.27.09.01	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	210.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.09.02	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	320.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.09.03	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	410.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD		100%	807.519.000,00		
4.401.27.10.01	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.10.02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	100.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.10.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	Bappeda Kabupaten Malang	2 dokumen	482.519.000,00	APBD Kabupaten	
4.401.27.10.05	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	Bappeda Kabupaten Malang	1 dokumen	125.000.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)						

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020	TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)	Keterangan
----	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------	------------

			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
				7.329.524.500,00	22	29	28,5	20,5	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.014.625.500,00	34,54	28,30	22,06	15,10	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	14.640.000,00	35%	30%	25%	10%	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	8.920.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	168 OB	277.180.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	42.000.000,00	40%	30%	20%	10%	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis	35.974.900,00	35%	30%	25%	10%	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	2.530.000,00	35%	30%	25%	10%	
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	5.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2996 HOK	20.680.000,00	35%	30%	25%	10%	
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	150 HOK	352.000.000,00	40%	30%	20%	10%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	372 HOK	202.000.000,00	40%	30%	20%	10%	
1.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis	50.200.600,00	25%	25%	25%	25%	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	3.500.000,00	25%	25%	25%	25%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	350.880.000,00	9,04	84,38	4,23	2,35	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	268.500.000,00	-	100%	-	-	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	10.000.000,00	35%	30%	25%	10%	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	23 unit	57.500.000,00	40%	35%	15%	10%	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 jenis	11.880.000,00	35%	30%	25%	10%	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 unit	3.000.000,00	35%	30%	25%	10%	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	15.500.000,00	-	100,00	-	-	
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	57 stel	15.500.000,00	0%	100%	0%	0%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	47.000.000,00	40%	35%	25%	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 orang	47.000.000,00	40%	35%	25%	-	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	24.000.000,00	-	-	18,75	81,25	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	7.000.000,00	-	-	-	100%	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	6.000.000,00	-	-	50%	50%	
5.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 buku	3.000.000,00	-	-	50%	50%	
5.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	8.000.000,00	-	-	-	100%	
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	1.970.000.000,00	31,71	23,57	33,68	11,04	
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	94%						
6.1	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	575.000.000,00	25%	30%	30%	15%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	82 / 82 dokumen Renja / P-Renja	290.000.000,00	25%	30%	30%	15%	
		Jumlah Aplikasi Pengembangan Pengembangan e-Renja	1 Aplikasi	85.000.000,00	-	-	100%	-	
6.3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	3 kegiatan	350.000.000,00	100%	-	-	-	
6.4	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	585.000.000,00	10%	35%	40%	15%	
		Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD	1 Aplikasi	85.000.000,00	-	-	100%	-	
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	1.170.000.000,00	18,33	25,00	31,67	25,00	
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%						
7.1	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	2 dokumen	390.000.000,00	15%	30%	35%	20%	
7.2	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	2 dokumen	390.000.000,00	15%	20%	35%	30%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	2 dokumen	390.000.000,00	25%	25%	25%	25%	
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	990.000.000,00	15,00	25,00	25,00	35,00	
		Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%						
8.1	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	2 dokumen	390.000.000,00	15%	25%	25%	35%	
8.2	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	3 dokumen	310.000.000,00	15%	25%	25%	35%	
8.3	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	2 dokumen	290.000.000,00	15%	25%	25%	35%	
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	940.000.000,00	15,00	25,00	30,00	30,00	
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	2 dokumen	210.000.000,00	15%	25%	30%	30%	
9.2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	2 dokumen	320.000.000,00	15%	25%	30%	30%	
9.3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	2 dokumen	410.000.000,00	15%	25%	30%	30%	
10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	100%	807.519.000,00	13,96	32,01	32,01	22,01	
10.1	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 dokumen	100.000.000,00	5%	35%	35%	25%	
10.2	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	1 dokumen	100.000.000,00	5%	35%	35%	25%	
10.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	2 dokumen	482.519.000,00	20%	30%	30%	20%	
10.4	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	1 dokumen	125.000.000,00	5%	35%	35%	25%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta sebagai pengukur capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur perencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta pelayan masyarakat yang terbaik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 akan melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI